

DIANGKAT JADI SESKAB Teddy Disarankan Mundur dari TNI



KR-Antara/Hafidz Mubarak A
Teddy Indra Wijaya

JAKARTA (KR) - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan, Mayor Teddy Indra Wijaya secara resmi tidak lagi menjabat sebagai Wakil Komandan Batalyon Infanteri Para Raider 328/Dirgahayu. Hal tersebut dipastikan Wahyu, setelah Teddy Indra diangkat menjadi Sekretaris Kabinet di Istana Negara Jakarta, Minggu (20/10).

"Kalau sudah penugasan di situ (Sekretaris Kabinet), berarti sudah penugasan di luar struktur, tentu nanti akan ada sertijab jabatan organiknya," kata Kadispenad, Senin (21/10).

* **Bersambung** hal 7 kol 5



KR-Antara/Hafidz Mubarak A
Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Tinggi Negara Kabinet Merah Putih yang baru dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Kabinet Merah Putih Dilantik Prabowo Dibantu 48 Menteri dan 55 Wamen

JAKARTA (KR) - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 serta lima pejabat setingkat menteri di Istana Negara Jakarta, Senin (21/10) pagi. Siang harinya, Prabowo giliran melantik 55 wakil menteri Kabinet Merah Putih.

Pelantikan jajaran menteri berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Proses pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden beserta daftar nama-nama yang dilantik menjadi menteri

dan jabatannya.

Selain 48 menteri, Presiden Prabowo juga melantik lima pejabat setingkat menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Setelah itu, para menteri satu per satu menandatangani surat pengangkatan yang disaksikan secara

langsung Presiden Prabowo Subianto.

Di luar dugaan, Prabowo masih memberikan kepercayaan kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Prabowo memberikan Luhut jabatan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Sebelum diangkat menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejak tahun 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Luhut juga pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada 2015-2016, menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

* **Bersambung** hal 7 kol 1

**SUNGGUH
SUNGGUH
TERJADI**

● **SABTU 12 Oktober 2024 pukul 13.35 WIB, saat saya jaga parkir depan masjid yang di Jalan Mataram Yogyakarta, ada mobil sedan kuning Brio parkir. Selesai salat, Mas dan Mbak pemilik mobil bayar parkir berupa dua paket boks plastik. Satu boks berisi 2 mie instan, 1 gelas miyak goreng, 1 kaleng sarden, 1 dus teh celup dan 6 sachet susu putih. "Ini dua paket buat bapak," kata mereka. (Achmad Mudjakir, Cokrodirjan DN 1/652 Yogyakarta 5523)-d**

Analisis Tantangan Perpajakan

Dr Nuritomo SE MAcc BKP



SEJAK 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto akan memimpin sekitar 275 juta rakyat Indonesia menuju generasi Indonesia Emas.

Upaya mencapai generasi Indonesia Emas memerlukan kerja keras yang digulirkan dalam berbagai program pemerintah. Program makan bergizi gratis, penyediaan 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, kelanjutan pembangunan IKN,

* **Bersambung** hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:26	14:34	17:36	18:46	03:56
Selasa, 22 Oktober 2024	Sumber: Kementerian Agama Kantor Wilayah DIY				

EKO SUWANTO AJAK MASYARAKAT WUJUDKAN PILKADA SEHAT, BERMARTABAT & BERBUDAYA



FORUM DPRD DIY

AGENDA besar akan dijalani masyarakat, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yakni pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Pemungutan suara yang akan dilaksanakan 27 November 2024 ini, akan memilih Kepala dan Wakil Kepala Daerah untuk Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo.

Dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang semakin dekat di wilayah DIY, Eko Suwanto, Anggota DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan pentingnya menjaga martabat pemilu. Menurutnya, pilkada mendatang harus bebas dari praktik tidak sehat dan memberikan ruang bagi pemilih untuk menggunakan hak suara mereka secara merdeka.

Eko Suwanto mengingatkan bahwa penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan tugas mereka dengan taat pada aturan perundang-undangan. "Edukasi politik yang baik sangat penting untuk menjaga integritas dan loyalitas



Anggota DPRD DIY, Eko Suwanto ST MSc (kiri).

KR- FX Harminanto

masyarakat," ujarnya dalam wawancara di Redaksi Kedaulatan Rakyat dengan Redaktur Pelaksana Pri-maswolo Sudjono.

Ia mengingatkan pengalaman pahit di pemilu sebelumnya, di mana Ketua Mahkamah Konstitusi dicopot akibat pelanggaran berat. Kejadian semacam itu seharusnya tidak terulang.

Netralitas Aparat

Di sisi lain, Eko Suwanto menekankan pentingnya netralitas aparat negara, termasuk TNI dan Polri dalam pilkada. "Kami berharap semua instansi dapat mengawal proses demokrasi dengan sebaik-baiknya, tanpa terlibat dalam kemenangan salah satu calon," tegasnya. Ini menjadi kunci agar masyarakat

bisa merasakan keadilan dalam proses pemilu.

Pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemilu juga menjadi sorotan. Eko Suwanto mengingatkan bahwa pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara menyeluruh. "KPU harus proaktif dalam menginformasikan setiap perubahan data pemilih, terutama terkait dengan mereka yang telah meninggal atau pindah," ungkapnya.

Pengalaman Eko mendatangi makam-makam di Tegalrejo untuk memastikan nama-nama yang masih terdaftar di DPT menyoro-ti perlunya pengelolaan data pemilih. Jangan sampai penduduk yang sudah

meninggal, masih tercantum dalam daftar pemilih.

Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keutuhan pemilu dengan cara yang positif. "Kampanye yang menyenangkan dan etis harus kita junjung, tanpa *black campaign* dan saling menjatuhkan," jelasnya.

Pengawasan

KPU diharapkan dapat mengawasi pencetakan surat suara dan menjaga agar tidak ada pelanggaran, termasuk praktik money politics yang bisa merusak tatanan demokrasi. Dalam

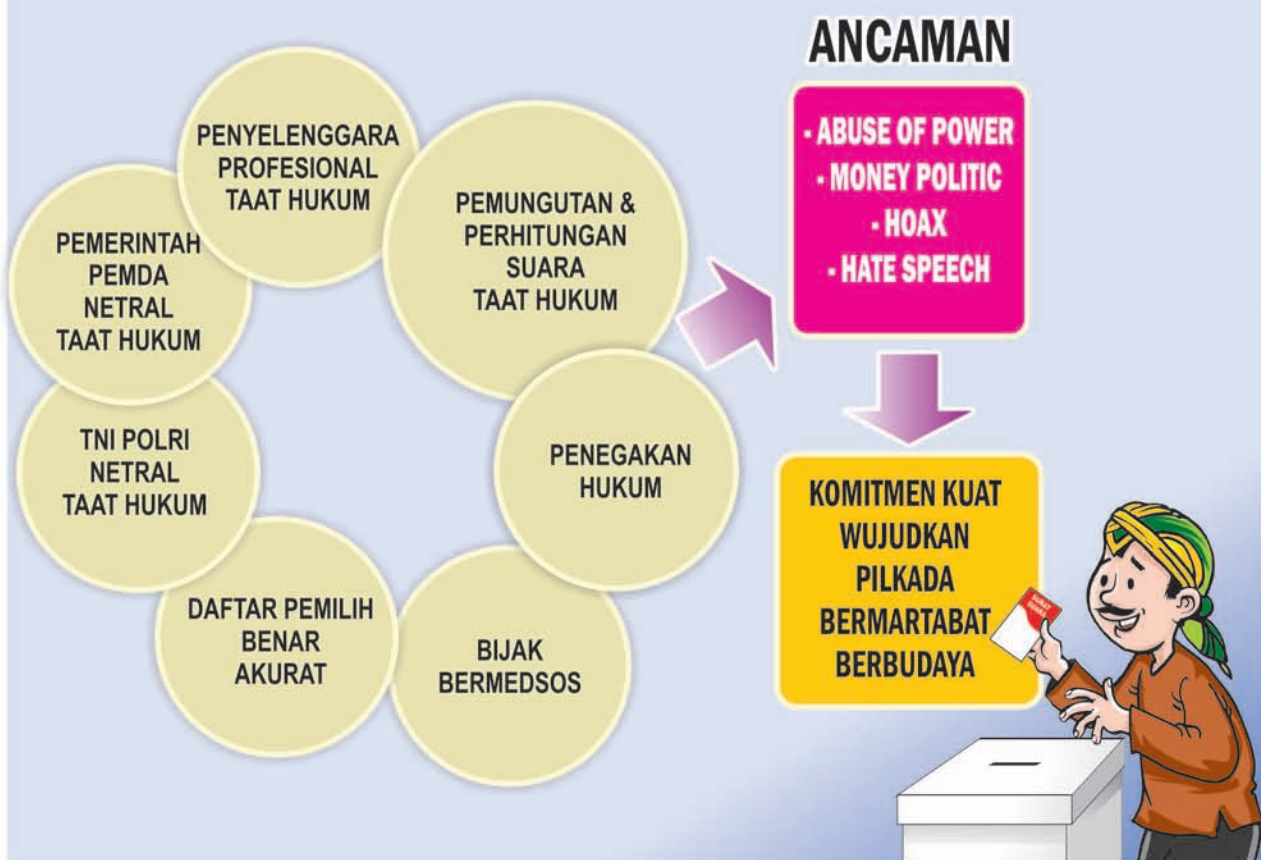
pencetakan surat suara hingga terdistribusi ke pemilih, hendaknya partai politik dilibatkan dalam pengawasan. Pelibatan ini juga sekaligus memastikan bahwa distribusi kertas suara berjalan dengan baik.

Eko juga mengingatkan bahwa satu bulan setelah pilkada adalah liburan Natal dan Tahun Baru. "Keamanan dan kenyamanan di tengah pemilu harus dijaga untuk memastikan liburan masyarakat dan wisatawan berjalan lancar," imbuhnya. Ia berharap agar seluruh elemen, termasuk penyelenggara dan peserta pemi-

lu, dapat berkolaborasi dalam menciptakan suasana yang aman.

Akhirnya, Eko menekankan bahwa pemilu bermartabat akan melahirkan pemimpin yang bermartabat untuk rakyat. "DPRD akan berperan sebagai jembatan antara pemimpin terpilih dan masyarakat, memastikan kerja sama yang baik untuk kemajuan daerah," tutupnya. Dengan komitmen ini, diharapkan pilkada di DIY dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam berdemokrasi dengan integritas dan martabat. (Fhx)-d

WUJUDKAN PILKADA SEHAT, BERMARTABAT & BERBUDAYA



Simak juga wawancara di :

krjogja.com



[krjogja.com](https://www.instagram.com/krjogja.com)



Kedaulatan Rakyat
@Krdjogadotcom



TikTok
Kedaulatanrakyat
Kedaulatan rakyat Media



YouTube Kedaulatan Rakyat TV

